



PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMPERKUAT ATAU MELEMAHKAN DEMOKRASI PANCASILA

Fitri Hanifa

fitri.hanifa0589@student.unri.ac.id

Universitas Riau, Indonesia

Mirani Br Tarigan

mirani.br3245@student.unri.ac.id

Universitas Riau, Indonesia

Puji Lestari

puji.lestari3257@student.unri.ac.id

Universitas Riau, Indonesia

Thoibatul Syamsinar

thoibatul.syamsinar3816@student.unri.ac.id

Universitas Riau, Indonesia

Hamdi Abdullah Hasibuan

hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id

Universitas Riau, Indonesia

Alamat: Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru 28293 – Indonesia

Korespondensi penulis : *fitri.hanifa0589@student.unri.ac.id*

Abstract : *Mass media plays a very important role in modern society, especially in a democratic system. As one of the pillars of democracy, mass media functions as a source of information, a means of social control, and a means of political education for the community. In the context of democracy, mass media has a responsibility to provide accurate, objective, and balanced information so that the community can make rational decisions in political life, including in elections. Mass media is considered a pillar of democracy because it plays an important role in ensuring freedom of speech and supporting open and transparent access to information in society. There are a number of reasons why media is considered a pillar of democracy. First, the media plays a role in increasing public participation. Mass media plays a vital role in supporting the democratic system by increasing public participation, ensuring government accountability, conveying accurate information, and supporting freedom of speech. However, the media also faces major challenges, such as the spread of false information, political polarization, and the influence of certain interests that can weaken democracy. Inaccurate information can damage public trust in the media and the democratic process itself.*

Keywords: *Mass Media, Democracy.*

Abstrak : Peran media massa sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam sistem demokrasi. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa berfungsi sebagai sumber informasi, wahana kontrol sosial, serta sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, media massa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilu. Media massa dianggap sebagai dasar demokrasi karena memiliki peran penting dalam membarikan kebebasan berpendapat dan mendukung jalan masuknya informasi yang terbuka pada masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa media dianggap sebagai dasar demokrasi. Pertama, media bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik. Media massa berperan vital dalam mendukung sistem demokrasi dengan meningkatkan partisipasi publik, memastikan akuntabilitas pemerintah, menyampaikan informasi yang akurat, dan mendukung kebebasan berpendapat. Namun, media juga menghadapi tantangan besar, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan pengaruh kepentingan tertentu yang dapat melemahkan demokrasi. Informasi yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan proses demokrasi itu sendiri.

Kata Kunci : Media Massa, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila, sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan lima sila pokok yaitu Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Rakyat, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memerlukan unsur-unsur fundamental untuk bertumbuh dan berkembang. Salah satu unsur penting dalam demokrasi modern adalah media massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam sistem demokrasi. Sebagai salah satu dasar demokrasi, media massa berfungsi sebagai sumber informasi, wahana kontrol sosial, serta sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, media massa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilu.

Namun, peran media massa tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di satu sisi, media yang independen dan bebas dapat menguatkan demokrasi dengan memberikan ruang bagi keberagaman opini, meningkatkan transparansi pemerintah, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Di sisi lain, media juga dapat melemahkan demokrasi jika digunakan sebagai alat propaganda, menyebarkan berita bohong (hoaks), atau memanipulasi opini publik demi kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran media massa dalam memperkuat atau melemahkan demokrasi menjadi penting untuk memastikan bahwa media berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Dalam era digital yang semakin kompleks, tantangan dan peluang bagi media massa dalam konteks demokrasi pun semakin beragam, menuntut perhatian lebih dari semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana media massa berperan dalam memperkuat atau melemahkan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada media massa tertentu, seperti televisi, koran, majalah, portal berita daring atau media sosial dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dan Media Massa

Demokrasi tidak lagi menjadi suatu istilah yang asing bagi seluruh masyarakat.

Hampir seluruh negara di dunia menyebut negaranya sebagai negara demokrasi. Hal ini menjadi bukti bahwa pandangan demokrasi sekarang ini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan yang lain. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan, sehingga secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi mengandung tiga pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*), yaitu berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui serta pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang diakui oleh rakyat sangat penting bagi suatu pemerintahan karena dengan diakui tersebut pemerintah dapat melaksanakan wewenangnya sebagai bentuk amanat yang diberikan oleh rakyat.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*), pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang melaksanakan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu selama melaksanakan tugasnya pemerintah diawasi oleh rakyat, dimana pemerintah harus patuh pada pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan mencegah terjadinya kesewenangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for the people*), yaitu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dari pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan cara pemerintah harus menampung aspirasi dari rakyat dalam membuat dan menjalankan wewenangnya untuk kepentingan rakyat.

Pada hakikatnya demokrasi merupakan suatu konsep untuk mencapai keputusan politik dimana seseorang memperoleh kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan bersama, yang diberikan secara bebas dari rakyat.. Lebih lanjut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat namun tidak langsung dijalankan oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh wakil-

wakil yang mereka pilih dalam lembaga perwakilan. Menurut Prof. Hazairin, demokrasi pancasila adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktikan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktik hidup bermasyarakat hukum adat, seperti nagari di Sumatra barat, desa di Jawa, huta di Sumatra Utara, pekon di Lampung dan Subak di Bali. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berakar dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia, berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Demokrasi sebagai jalan tengah dalam mempersatukan keberagaman Masyarakat akan budaya dan suku di Indonesia. Alasannya karena hampir seluruh negara di dunia menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas fundamental, demokrasi juga memberikan arah bagi masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, sehingga diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang benar pada masyarakat mengenai demokrasi. Salah satu unsur penting untuk mewujudkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dapat melalui dari media massa.

Peran media massa di suatu negara demokrasi sangatlah fundamental, khususnya untuk memastikan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berjalan dengan baik. Media massa dianggap sebagai dasar demokrasi karena memiliki peran penting dalam memberikan kebebasan berpendapat dan mendukung jalan masuknya informasi yang terbuka pada masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa media dianggap sebagai dasar demokrasi. Pertama, media bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik terutama terkait proses demokrasi. Media membantu membentuk opini publik tentang isu-isu politik dan mengikuskertkan orang untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti aksi protes, pemilihan umum, serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi. Kedua, media juga berperan dalam memastikan pertanggung jawaban pemerintah. Dengan melaporkan tindakan-tindakan pemerintah yang tidak benar atau tidak efektif, media membantu meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik. Ketiga, media membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang pasti, terpercaya, dan benar tentang isu-isu politik dan sosial saat ini. Dengan informasi yang pasti dan terpercaya, masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat. Keempat, media mendukung kebebasan berpendapat sebagai salah satu pokok dasar demokrasi. Dengan mendorong masyarakat untuk menyuarakan pendapat dalam

diskusi yang terbuka dan beragam, media memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat tanpa takut diintimidasi atau dibatasi oleh pemerintah atau kekuatan lainnya.

Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilu guna memastikan kualitas demokrasi yang baik. Menurut Priya Kumari dan Suhas M.P media massa dapat dianggap sebagai dasar keempat demokrasi, karena memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Media memainkan peran vital dalam menyebarluaskan informasi tentang Kebijakan publik, isu-isu sosial yang relevan dan tindakan pemerintah. Media secara aktif pemberi informasi yang akurat dan terpercaya serta memberikan akses yang sama kepada semua yang berkepentingan. Dalam hal ini, media harus tetap independen dan tidak memihak pada satu kandidat atau partai politik. Media juga harus memperhatikan kode etik dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, dan tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Dengan peran media yang baik, Masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan memilih pemimpin yang dapat memajukan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Media Massa dalam memeperkuat dan melemahkan demokrasi

Media massa memiliki pengaruh besar untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi arus komunikasi politik. Melalui isi konten-kontennya, media massa dapat menyampaikan isu-isu politik yang sesuai, membentuk kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi politik, serta meningkatkan pemahaman tentang peran dan keikutsertaan masyarakat dalam memperkuat demokrasi. Dalam hal ini, media massa dapat mendukung aksesibilitas dan visibilitas Masyarakat dalam politik, sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi untuk terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi. Media massa dapat memberikan platform dan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam konteks politik melalui kebebasan pers untuk menyuarakan pendapat baik secara tulisan maupun lisan, Yang menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas demokrasi suatu negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi, wawancara, atau liputan acara politik. Media massa dapat memberikan dukungan pada suara-suara masyarakat yang sering kali diabaikan dan tidak didengar dalam diskusi politik. Hal ini dapat mendorong partisipasi politik dengan memberikan ruang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, serta memperkuat hak masyarakat untuk

berbicara dan diakui dalam ruang lingkup politik.

Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai kekuatan media massa, berikut ini penulis uraikan mengenai kekuatan masing-masing bentuk media massa yang berkembang pada saat ini.

1. Kekuatan Media Massa Cetak

Dalam hal ini, media cetak, termasuk buku, majalah, dan surat kabar, berfungsi sebagai sarana komunikasi dan persuasi bagi para praktisi politik, partisan politik, dan pemerhati politik. Media cetak juga digunakan untuk mensosialisasikan visi dan misi kandidat presiden serta memberikan informasi lengkap dan semenarik mungkin tentang program jangka panjang dan pendek yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Dalam liputan berita, liputan khusus, fitur, analisis, iklan, dan jenis publikasi lainnya digunakan untuk menggabungkan informasi ini sehingga bermanfaat dan menarik bagi pemilih. Kemasan publikasi dalam media cetak seperti ini dimaksudkan sebagai himbauan agar calon pemilih tertarik dan terpicat pada calon presiden yang telah disosialisasikan dan dipopulerkan selama kampanye. Media cetak menarik karena sifatnya yang lama karena informasi dapat disimpan tanpa perlu melakukan “perekaman”, seperti yang dilakukan media siaran. Dengan demikian, informasi dapat dengan mudah diperoleh kembali pada saat diperlukan. Oleh karena itu, media cetak tidak sama dengan media siaran radio atau televisi dalam hal komunikasi, informasi, dan persuasi.

Ini menunjukkan kekuatan media cetak. Selain itu, informasi media cetak memiliki kekuatan bagi orang-orang tertentu, terutama mereka yang berpendidikan. Seperti disebutkan di atas, orang-orang menyukai data dan informasi cetak. Mereka membutuhkan data dan informasi dalam bentuk cetakan karena jenis ini biasanya merupakan hasil observasi dan analisis yang cukup mendalam dan representatif, yang dapat digunakan untuk kepentingan mereka sendiri dan orang lain. William L. Rivers juga berpendapat bahwa orang berpendidikan tinggi lebih menyukai media cetak atau bacaan dibandingkan dengan siaran, sedangkan orang berpendidikan menengah lebih suka televisi dan radio.

2. Kekuatan Media Siaran

Radio dan televisi adalah media massa dalam hal ini. Radio tidak lagi dianggap sebagai media massa yang efektif untuk kampanye dalam masyarakat politik Indonesia saat ini karena popularitas radio semakin menurun bersamaan dengan munculnya media massa televisi. Oleh karena itu, radio umum kurang diprioritaskan oleh para praktisi politik, partisan politik, dan pemerhati politik sebagai alat komunikasi, informasi, dan persuasi dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa radio merupakan media yang sangat praktis karena dapat didengarkan di mana saja dan kapan saja seseorang melakukan aktivitas lainnya. Mereka memilih siaran televisi sebagai media massa karena tayangan televisi lebih menarik daripada kegiatan kampanye yang disiarkan melalui radio. Bukan berarti mereka tidak menggunakan radio, mereka tetap menggunakannya, tetapi kuantitas dan kualitas siaran radio tidak sebanyak yang mereka lakukan melalui media massa siaran televisi. Televisi telah menjadi media massa yang paling mudah dikomunikasikan dan paling disukai oleh kedua belah pihak para politisi dan pemilik hak pilih dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini karena televisi merupakan kombinasi audio visual dan berfungsi sebagai penyampai isi atau pesan seolah-olah secara langsung antara komunikator (pembawa acara atau pengisi acara) dan pendengar. Karena dapat didengar dan dilihat secara bersamaan, televisi membuat informasi mudah dipahami.

Bahkan televisi, terutama acara “live show”, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah. Para politisi lebih menyukai liputan televisi karena mereka lebih nyata dan akrab dari pada foto atau kutipan pembicaraan mereka di surat kabar. Televisi juga dapat menyiarkan secara langsung, yang menjadikannya lebih dipercaya dari pada media cetak karena tidak dapat mengedit. Televisi dapat berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi pemilih. Televisi adalah alat demokrasi yang sebenarnya.. sepeerti yang dikatakan oleh Yusuf Maulana bahwa mengelola kesan yang dapat dikomunikasikan melalui televisi merupakan bagian penting dari komunikasi politik. Visualisasi tubuh dan artikulasi verbal dari para kandidat maupun tim sukses atau para aktor dan narrator dalam penayangan tersebut merupakan bagian dari fungsi bahasa yang harus diperhatikan sehingga dengan demikian penayangan itu merupakan hasil dari pengolahan citra melalui

bahasa, yang menurut istilah Ben Anderson gejala ini disebut penopengan yang mereduksi, bahkan mengubah pesan sehingga berbeda dari aslinya.

Dalam kampanye, tentunya, kesan atau citra yang ingin ditampilkan adalah yang positif dan mampu mendapatkan perhatian dari para penonton, yang akhirnya mampu mengubah pandangan untuk memilih kandidat presiden yang dikehendaki dalam penayangan tersebut. Bentuk penayangan berikutnya adalah liputan kampanye dalam acara berita reguler maupun dalam berita khusus yang disediakan oleh stasiun televisi dalam rangka kampanye. Cara penayangan ini juga menjadi media bagi para kandidat dan tim suksesnya untuk memberikan informasi selengkap dan semenarik mungkin kepada para penonton sehingga mampu visi dan misinya tersampaikan yang pada akhirnya, diharapkan bisa mempunyai daya pengaruh yang kuat bagi para calon pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Ini juga berlaku untuk acara diskusi dan debat terbuka yang diatur oleh stasiun televisi dan komite pemilihan presiden. Semuanya dirancang untuk memberikan informasi yang lengkap dan menarik kepada penonton, terutama pemilih. Acara diskusi dan debat terbuka baik yang disiarkan secara langsung maupun tidaklangsung mempunyai kekuatan dan daya tarik tersendiri karena memberikan gambaran langsung tentang kualitas kandidat presiden saat ini. Di sisi lain, masing-masing kandidat dan karyawan memiliki kesempatan untuk menggunakan berbagai pendekatan persuasif untuk memikat calon pemilih mereka.

3. Kekuatan Media Internet

Selain media cetak dan televisi, para praktisi politik dan partai politik saat ini juga menggunakan media internet khususnya website, untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan persuasi tentang masalah yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah situs web (website) yang menyediakan informasi tentang pemilihan umum dalam bentuk tulisan dan visual. Situs-situs ini merupakan gabungan dari media cetak dan audio visual, sehingga memberikan informasi yang lengkap dan persuasif. George Clack mengatakan bahwa internet mengubah komunikasi politik dan sekaligus wacana public dengan cara yang halus.

Dengan adanya Internet para reporter telah mampu dengan cepat mengakses "dokumen dan database pemerintah, perpustakaan umum dan swasta , serta arsip surat kabar dan publikasi lainnya ". Hal ini menunjukkan bahwa di masa yang akan datang internet akan menjadi salah satu media massa yang sangat berpengaruh atau bahkan bisa menjadi media massa yang unggul, khususnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Selain itu, para praktisi politik, terutama tim pelaksana kampanye presiden, memanfaatkan metode perubahan komunikasi politik ini dengan menggunakan internet sebagai alat untuk berkomunikasi dan mendorong keberhasilan kampanye mereka. Mereka menggunakan situs web untuk melakukan kampanye dengan menyediakan informasi yang lengkap dan persuasif dalam berbagai tampilan yang dilengkapi dengan fitur audio-visual. Terlebih lagi, situs web tersebut memungkinkan komunikasi dua arah.

Namun, ada juga potensi bahwa media massa dapat melemahkan demokrasi diantaranya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui media sosial dan platform online lainnya yang dapat merusak kredibilitas informasi dan mempengaruhi opini Masyarakat, Hal ini dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Opini publik adalah kumpulan opini individu tentang masalah-masalah tertentu yang mempengaruhi sekelompok orang atau masyarakat. Masyarakat yang menerima informasi palsu atau tidak akurat dapat mengambil keputusan yang tidak tepat, sehingga merusak proses demokratis, dan juga dapat merusak kepercayaan terhadap media, sehingga mengancam integritas media dan mempengaruhi pembentukan opini publik. Selain itu juga, melemahnya demokrasi pancasila dapat dilihat dari pelanggaran keamanan informasi dan pemahaman data yang dapat merusak kepercayaan masyarakat pada media dan lembaga-lembaga demokratis. Jika kehilangan kepercayaan masyarakat pada media sebagai sumber informasi yang kredibel, hal itu dapat merugikan proses demokrasi. Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam mendukung fungsi media sebagai penjaga kebenaran dan pembawa informasi. Selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah polarisasi politik yang terkadang diperparah oleh media massa yang cenderung mewakili atau mendukung kelompok atau ideologi tertentu. Hal ini dapat mempersempit ruang diskusi publik, menghalangi dialog antara berbagai pihak, dan meningkatkan konflik sosial-politik. Misalnya, media yang terpolarisasi dapat memperkuat pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang sulit untuk mencapai kesepakatan

bersama.

Secara keseluruhan, media massa memiliki potensi besar untuk menguatkan demokrasi dengan mempromosikan transparansi, memobilisasi partisipasi publik, dan menegakkan akuntabilitas pemerintah. Namun, tantangan seperti polarisasi politik, ketergantungan ekonomi, dan dinamika digital menunjukkan bahwa peran mereka harus dikelola dengan hati-hati dan dilindungi dengan aturan yang mendukung kebebasan berekspresi dan integritas informasi. Media massa juga memiliki potensi besar untuk menguatkan demokrasi dengan memberikan akses informasi dan mendorong pertukaran ide yang sehat. Namun, tantangan seperti kontrol politik dan risiko desinformasi perlu diatasi untuk memastikan media tetap menjadi kekuatan positif dalam proses demokratisasi. Pemberitaan yang berimbang, kontrol pemerintah dan oligarki media, manipulasi dan desinformasi, kehadiran media sosial ikut serta dalam menguatkan atau melemahkan demokrasi.

KESIMPULAN

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan rakyat, memiliki tiga prinsip utama: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi telah diakui secara global sebagai bentuk pemerintahan yang ideal karena memberikan legitimasi kepada pemerintah, memastikan pengawasan rakyat, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Di Indonesia, konsep Demokrasi Pancasila menjadi ciri khas, karena tumbuh dari tradisi adat dan nilai-nilai asli bangsa.

Media massa berperan vital dalam mendukung sistem demokrasi dengan meningkatkan partisipasi publik, memastikan akuntabilitas pemerintah, menyampaikan informasi yang akurat, dan mendukung kebebasan berpendapat. Media massa dianggap sebagai dasar keempat demokrasi, karena berperan sebagai pengawas kekuasaan dan penjaga transparansi dalam sistem politik, terutama dalam konteks pemilu dan pengambilan keputusan yang demokratis. Namun, media juga menghadapi tantangan besar, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan pengaruh kepentingan tertentu yang dapat melemahkan demokrasi. Informasi yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan proses demokrasi itu sendiri.

Secara keseluruhan, media massa memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi melalui transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Namun, potensi

negatifnya, seperti polarisasi dan manipulasi informasi, harus dikelola dengan bijaksana agar media tetap menjadi kekuatan positif dalam mendukung proses demokratisasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- CIPG. (2015). Tentang Media dan Demokrasi. *Cipg*, 4, 52. <http://docplayer.info/30271231-Tentang-riset-seri-1-rangkaian-modul-creame-critical-research-methodology.html>
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., Ltubing, J. M. S., Hidayat, A., Setiawan, D., & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1), 59–64. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61>
- Mudrikah, A., Jayanti, E. F., Setiaulia, T. C., & Rian, T. A. (2024). *Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital*. 4.
- Nuraeni Nuraeni, Lupki Lupki, & Muhamad Jafar. (2024). Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 216–222. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.777>
- Setiawan, Z. (2021). Media Massa, Negara Dan Demokrasi: Kekuatan Politik Media Massa Dalam Mendorong Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Spektrum*, 18(1), 1–18.
- Turnitin, B. (2024). *PERAN _ MEDIA _ MASSA _ DALAM _ MEMPERKUAT _ ATAU _ MELEMA HKAN _ DEMOKRASI _ PANCASILA*.
- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran Media Massa dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72–78. <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i9.158>